

KEBANGKITAN EKONOMI LOKAL: Kemunculan *Ponggawa* Pertambakan dan Fenomena Industri Pengolahan Udang Ekspor di Delta Mahakam

Rise of Local Economy: Emerging Phenomenon Ponggawa Aquaculture and Export Shrimp Processing Industry in The Mahakam Delta

P. Setia Lenggono^{*)}, Arya H. Dharmawan, Endriatmo Soetarto, Didin S. Damanhuri

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekolog Manusia, Institut Pertanian Bogor

*) Email: setia.lenggono@yahoo.com

Diterima 15 Juli 2012 / Disetujui 11 September 2012

ABSTRACT

*Failure of forest management systems in the Third World has led to deterioration of the forest and create enclaves of poverty in the villages on the edge of the woods. In that regard, aquaculture activities in the Mahakam Delta Aquaculture Zone Forest conversion, very interesting to study because it is able to move aquaculture capitalization. This study aims to reveal the historical and contextual, the mangrove forest tenure by Bugis migrants and their effects on the local economies in the Mahakam Delta. The results of this study, suggests that the process of formation of the local economy caused by the operation of the export activities of the fishing industry in 1974 that opened the space for the presence of middlemen in areas that are not able to handle the company directly. Many local entrepreneurs who succeed are the Ponggawa followers who managed to extension effort, taking advantage of the momentum "of excellence at the first opportunity to start", after the ban on trawling in 1983. Although economic activity has an impact on the local ecology landscape changes, due to the "state inaction" on Aquaculture Zone Forest, which became the arena of private aquaculture conversion. With cultural hegemony, the Ponggawa able to "exploitation" through the creation of a monopolistic market structure or monopsonistic, resulting in a monopoly of raw materials and capital accumulation which encourages the export of fishery industrialisasi by Ponggawa. Nevertheless, the pattern of relationships aquaculture still leaves room reciprocity inherent in tradition *passee*, thus reducing the pattern of relationships that tend *eksploitatif*. The pattern of patron-client relationships that adaptive as is then sustain the economic sustainability of local-laden aquaculture competition and uncertainty.*

Keywords: *local economy, aquaculture, Ponggawa, the power of natural resources, forestry cultivation area, the shrimp processing industry exports.*

ABSTRAK

Kegagalan sistem pengelolaan hutan di Dunia Ketiga telah menyebabkan kemerosotan hutan dan menciptakan kemiskinan pada desa-desa di pinggir hutan. Dalam hal tersebut, kegiatan pertambakan di kawasan Delta Mahakam dengan konversi Kawasan Budi daya Kehutanan, sangat menarik dicermati karena mampu menggerakkan kapitalisasi pertambakan. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan secara historis dan kontekstual, terjadinya penguasaan hutan mangrove oleh migran Bugis dan pengaruhnya terhadap proses pembentukan ekonomi lokal di kawasan Delta Mahakam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan ekonomi lokal terjadi akibat beroperasinya kegiatan industri perikanan ekspor pada 1974 yang membuka ruang bagi kehadiran pedagang perantara pada area-area yang tidak mampu ditangani langsung perusahaan. Banyak diantara pengusaha lokal yang sukses adalah para *pongawa* pengikut yang berhasil melakukan ekstensifikasi usaha, dengan memanfaatkan momentum "keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai", pasca pelarangan *trawl* pada 1983. Meskipun aktivitas ekonomi tersebut berdampak pada perubahan tatanan ekologi lokal, akibat "pembiaran negara" atas Kawasan Budi daya Kehutanan, yang menjadi ajang konversi pertambakan pribadi. Dengan hegemoni kulturalnya, para *pongawa* mampu melakukan "eksploitasi" melalui penciptaan struktur pasar yang monopolistik atau monopsonistik, sehingga terjadi monopoli bahan mentah dan akumulasi kapital yang mendorong dilakukannya industrialisasi perikanan ekspor oleh *Ponggawa*. Meskipun demikian, pola hubungan pertambakan masih menyisakan ruang *resiprositas* yang melekat pada tradisi *passee*, sehingga mereduksi pola hubungan yang cenderung *eksploitatif*. Pola hubungan patron-klien yang adaptif seperti inilah

yang kemudian menopang keberlangsungan ekonomi lokal-pertambakan yang sarat persaingan dan ketidakpastian.

Kata Kunci: ekonomi lokal, pertambakan, *pongawa*, kuasa sumber daya alam, kawasan budi daya kehutanan, industri pengolahan udang ekspor.

PENDAHULUAN

Salah satu ekosistem delta yang memiliki vegetasi mangrove yang unik, dengan tutupan nipah sangat luas adalah Delta Mahakam. Ekosistem mangrove yang memiliki sebaran zona *nypa fruticans* ini, membentuk formasi murni dengan luasan 50 persen dari seluruh tutupan Delta Mahakam, yang menurut Mac Kinnon (2000) merupakan formasi nipah terluas di dunia. Ironisnya luasannya diduga hanya tersisa 11.000 Ha. Konversi hutan mangrove yang semakin intensif terjadi seiring dengan berdirinya beberapa perusahaan eksportir perikanan di sekitar kawasan Delta Mahakam sejak 1974. Besarnya permintaan pasar global terhadap hasil perikanan (khususnya udang windu), telah memicu terjadinya pengalihfungsian *common property* menjadi area pertambakan pribadi, sehingga terjadi degradasi kualitas lingkungan secara signifikan dalam waktu relatif singkat dan mencapai puncaknya ketika terjadi *boom* udang pada tahun 2008.

Peluso (2006) menilai bahwa krisis hutan tropis bersumber pada kelembagaan yang tidak pas, khususnya lembaga-lembaga yang membawahi sistem akses dan penguasaan sumber daya. Menurut Blaikie, kebanyakan sistem pengelolaan hutan di Dunia Ketiga telah gagal mengatasi kemerosotan hutan maupun kemiskinan pedesaan. Artinya keberadaan hutan negara telah menciptakan *enclaves* kemiskinan pada desa-desa di pinggir hutan. Seperti disinyalir Awang (2004) yang mengungkapkan “pada 1994 sekitar 46 persen desa-desa miskin di Jawa berada di sekitar kawasan hutan negara”. Senada dengan Peluso (2006); Purwanto, dkk (2003) menemukan fenomena masyarakat desa miskin dan tertinggal di sekitar kawasan hutan negara. Tidak berlebihan jika Ishak (2003), menyebut peranan kehutanan masih belum berhasil mengangkat ekonomi mikro terutama ekonomi rakyat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan dan kemampuan ekonomi daerah, serta kemampuan pelestarian hutan untuk terus mendorong perekonomian nasional.

Namun demikian, menurut Hall, *et al* (2011) berbagai kebijakan dalam sistem pengelolaan hutan tersebut, ternyata setiap harinya tidak hanya menyebabkan tercerabutnya masyarakat (*dispossession*) dari kawasan hutan yang telah mereka tradisikan secara turun temurun, namun juga mendorong terjadinya akumulasi alat produksi dan kapital pada sejumlah pihak yang diuntungkan dengan beroperasinya kebijakan tersebut. Setidaknya menurut catatan World Bank, berbagai dilema kebijakan kehutanan di Indonesia mulai terjadi sejak rezim Orde Baru menyatakan klaimnya atas hutan yang mencakup sekitar tiga perempat luas negara, mengambil alih hak-hak masyarakat tradisional atas hutan-hutan mereka. Dengan melakukan perencanaan

penetapan wilayah berskala besar untuk menjelaskan daerah-daerah perlindungan, pengelolaan kayu/hutan dan alih fungsi, yang seringkali diabaikan atau bahkan dimanipulasi. Akibatnya, 40 juta orang Indonesia hidup di daerah yang ditetapkan sebagai wilayah hutan tetapi kekurangan pohon (hutan tanpa pohon), di daerah dengan larangan pertanian (termasuk perikanan), tanpa adanya jaminan hak penguasaan lahan (Chomitz, 2007).

Hingga saat ini, tidak banyak riset empiris atau motivasi teoritis untuk mencermati pola migrasi yang dilakukan secara berbeda yang mempengaruhi institusi *common pool resource* di dalam bioekoregion delta. Mengingat interaksi manusia di Delta Mahakam telah meningkat dalam 40 tahun terakhir, maka pemahaman bagaimana mobilitas etnik dilakukan, apa motivasinya dan seperti apa pola penguasaan sumber daya alam, saling berhubungan dan mempengaruhi lingkungan dalam ekosistem yang lebih luas menjadi penting untuk diungkapkan. Tentunya, jika dikaitkan dengan minimnya literatur yang mengulas keberadaan masyarakat lokal di sekitar hutan negara dalam perspektif berbeda. Bagaimana sebuah entitas pendatang mampu mensiasati dan memanfaatkan sumber daya di tempat baru bagi kepentingan sosio-ekonomi dan eksistensi dirinya, hingga mengakumulasi alat produksi dan modal kapital pertambakan.

Menariknya kegiatan pertambakan yang diklaim “ilegal” oleh otoritas kehutanan karena dilakukan dalam kawasan budi daya kehutanan, terus berlangsung tanpa penertiban oleh pihak berwenang. “Pertambakan ilegal” tersebut, bahkan mampu memicu munculnya kapitalisme pertambakan, yang mendorong terjadinya diversifikasi usaha, *cold storage*, *hatchery*, pabrik es, *mini market*, industri pengolahan hingga fenomena *take over* perusahaan perikanan internasional oleh *pongawa*. Dalam konteks tersebut kegiatan pertambakan di Delta Mahakam menjadi menarik secara teoritik ketika tidak hanya dipandang sebagai penyebab terjadinya degradasi hutan mangrove, namun juga dipahami sebagai ekspektasi dari tindakan ekonomi dalam kebudayaan Bugis yang sarat nilai dan kepentingan, khususnya pada diri *pongawa* yang menduduki puncak hierarki. Konsep *pongawa* disini merujuk pada sebutan masyarakat Bugis di pantai timur Kalimantan, pada seorang pemilik modal yang mengumpulkan dan membeli hasil produksi perikanan (hasil tangkapan maupun budi daya tambak), selain memberikan pinjaman saprotan serta modal usaha dalam bentuk fasilitas/materi bagi klien mereka. Para pengusaha lokal tersebut tidak hanya mampu *survive* ditengah gempuran pasar global, mereka bahkan berhasil memainkan peran penting dalam menopang pondasi ekonomi bangsa, ketika hampir semua suprastruktur ekonomi mengalami “kebangkrutan” pasca krisis tahun 2007/2008.

Artikel ini bertujuan mengungkap secara historis dan kontekstual terjadinya penguasaan hutan mangrove dan pengaruhnya terhadap ekonomi lokal-pertambakan di Delta Mahakam. Kajian yang dilakukan mencakup proses rekonstruksi kemunculan dan kelangsungan sosial golongan *pongawa* dalam kegiatan pertambakan, sehingga akan memberikan tinjauan empiris dan teoritis atas keberlangsungan fenomena kebangkitan ekonomi lokal.

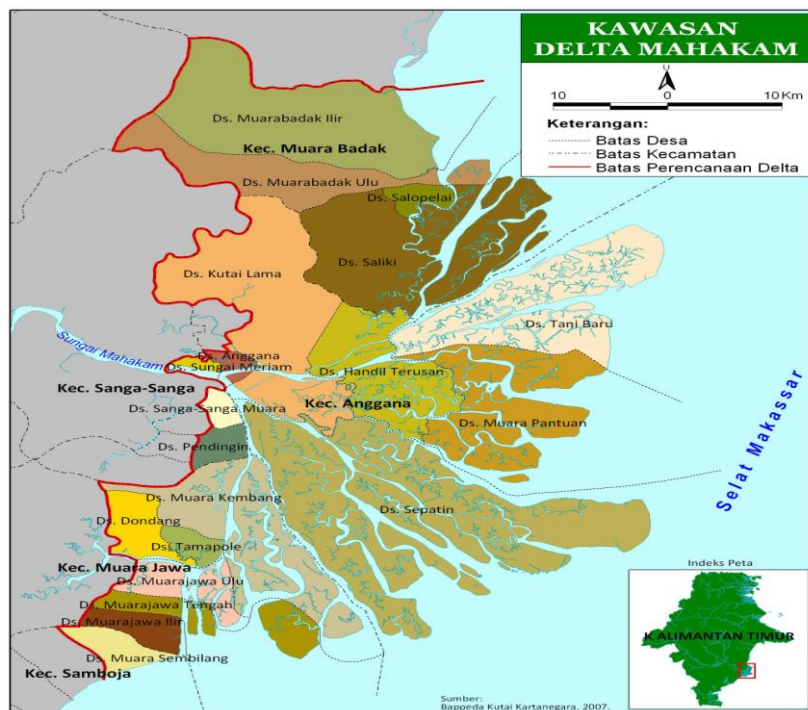
PENDEKATAN PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah kawasan Delta Mahakam yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur (Gambar 1). Pra-penelitian dilakukan sejak Maret 2007 hingga Agustus 2008, untuk mendapat gambaran komprehensif, serta menghimpun data aktual terkait dengan rencana penelitian. Dengan menggunakan data pra-penelitian tersebut, berhasil disusun sejumlah isu permasalahan, serta profil sosial budaya dan sumber daya Delta Mahakam yang mendukung penyusunan proposal penelitian – pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian mulai dilakukan secara intersif Maret hingga Juli 2009 dan dilanjutkan kembali Januari hingga April 2010.

Secara paradigmatik, penelitian ini menggunakan

diantaranya: (1) metode Fenomenologi, sebuah metode yang berupaya mendapatkan pengertian yang benar dengan menangkap realitas apa adanya dan (2) metode Etnografi, sebagaimana dikenal dalam antropologi dikenal juga dalam batas-batas tertentu sebagai studi kasus. Menurut Yin (1996), studi kasus merupakan strategi yang tepat digunakan jika bentuk pertanyaan penelitian adalah “mengapa” (deskriptif) dan “bagaimana” (eksplanasi). Sementara pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan berperan-serta (*participant-observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber serta studi pustaka dari penelitian terdahulu dan dokumen sejarah yang terkait penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif: *pertama*, analisis data yang dihasilkan dari pengamatan berpartisipasi, wawancara dan studi riwayat hidup; *kedua*, analisis terhadap data historis dan teks kejadian masa lampau/kontemporer terkait gejala sosial yang diteliti. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah individu *pongawa* dan mereka yang dianggap memiliki hubungan erat, sekaligus memiliki pengetahuan mendalam tentang kehidupan para *pongawa* serta teks



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktif dipilih mengingat adanya konstruksi sosial yang perlu dipahami dari persepsi dan perspektif etika/moral *pongawa*. Dengan menggunakan paradigma konstruktivis peneliti akan memotret realitas sosial, tidak hanya realitas objektif yang berada di luar diri orang yang diteliti, tetapi juga realitas subjektif yang berada di dalam diri orang yang diteliti, menyangkut kehendak dan kesadarannya (Hardiman, 2003).

Penentuan paradigma konstruktivis, mengandung konsekuensi penggunaan sejumlah metode relevan,

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penelitian.

Pembiaran Negara Atas Kuasa Sumber daya Alam

Mekipun kawasan Delta Mahakam telah memiliki peradaban, jauh sebelum orang Bugis bermigrasi ke kawasan ini, namun orang Bugis-lah yang pertama melakukan ekspansi hingga ke pulau-pulau dalam kawasan ini. Diduga mereka telah menetap di kawasan ini, menjelang pertengahan abad-19, sesaat sebelum Hindia Belanda menaklukkan kerajaan Kutai pada 1844. Para migran Bugis tersebut, mencari peruntungan dan bertahan hidup dengan berdagang, menjadi nelayan dan

berkebun, meskipun ada pula yang berprofesi ganda, terlibat perompakan dan penyelundupan.

Pada masa revolusi fisik (1950-1965), muncul lagi gelombang besar migrasi dari Sulawesi. Motivasi kedatangan mereka adalah ingin menyelamatkan diri dari kekacauan ekonomi dan militer, serta mengikuti nasehat sanak saudara/ teman yang memberitakan adanya lokasi hutan yang bisa dikonversi menjadi area pertanian/ perkebunan menguntungkan. Gelombang besar migrasi berikutnya terjadi pada tahun 1980-an hingga 1990, dilakukan tidak hanya migran Bugis dari Sulawesi, namun juga melibatkan migran Bugis yang telah menetap di kota-kota sepanjang pantai timur. Para migran tersebut berdatangan ke Delta Mahakam, seiring pesatnya perkembangan kawasan ini akibat aktifitas eksploitasi migas, serta beroperasinya industri perikanan ekspor.

Proses modernisasi dan industrialisasi yang berlangsung cepat tersebut, merupakan bagian dari penancangan “program pembangunanisme” Rezim Orde Baru, yang ingin menurunkan tingkat inflasi dan hutang luar negeri. Pemerintah menempuh cara instan, memanfaatkan modal, teknologi dan pengalaman asing, dengan menerbitkan UU No. 1/ 1967, tentang Penanaman Modal Asing. Selanjutnya melalui instrumen UU No. 5/ 1967, tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, penguasaan dan prosedur pengelolaan hutan pun diatur secara tegas. Unifikasi hukum nasional ini memiliki arti strategis dalam mengamankan kepentingan negara dan para pemodal besar, karena akan menggantikan perundangan disektor kehutanan, yang berasal dari zaman kolonial dan feodalisme lokal yang beragam coraknya. Sementara UU No.11/ 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang dimaksudkan menjarung “para pemain asing” disektor pertambangan yang padat modal, ditetapkan beberapa saat setelah itu.

Hasilnya, konsorsium internasional menyetujui penangguhan pembayaran hutang dan nilai rupiah dapat distabilkan dengan mengaitkannya dengan dollar AS. Sebagai gantinya, sebagian besar milik asing yang disita pada 1957, bertahap dikembalikan pada pemiliknya dan konsesi-konsesi baru diberikan, khususnya konsesi kehutanan dan minyak (Lombard, 2005). Salah satu kawasan strategis yang ditawarkan ialah Blok Mahakam, yang pada 1970 dimenangkan Total bersama Japex. Sampai dengan 2009, telah 1000 sumur di bor. Dengan investasi mencapai US \$ 13 Milyar, *Total FinaElf* setidaknya mempekerjakan 4.000 karyawan dan secara tidak langsung menghasilkan pekerjaan bagi 20.000 orang. Pada 2009, *Total FinaElf* menargetkan produksinya 92.400 barel minyak dan 2.600 MMSCFD gas perhari.

Sementara, besaran potensi perikanan Delta Mahakam dan pantai timur Kalimantan, ternyata juga menarik sejumlah PMA dan PMDN yang bergerak di sektor perikanan ekspor untuk menanamkan modal di kawasan ini. Setidaknya pada 1974 telah berdiri sebuah perusahaan industri perikanan ekspor (PMA) dari Jepang dan sebuah PMDN yang mulai beroperasi empat tahun setelahnya. Keberadaan industri perikanan skala ekspor tersebut, mampu membangkitkan gairah usaha perikanan

tangkap lokal, sehingga produksi perikanan di pantai timur Kalimantan mengalami peningkatan. Sampai tahun 1979, satu tahun sebelum diberlakukannya PP No. 39/1980 yang melarang *trawl*, produksi perikanan tangkap Kaltim telah mencapai 37.433 ton.

Penghapusan jaring *trawl*, diberlakukan menyusul terjadinya beragam konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan *trawl*. Akibatnya sejak 1980 hingga 1986, terjadi penurunan produksi dan baru mengalami peningkatan ketika industri perikanan berhasil melakukan modernisasi armada perikanan tangkap. Pelarangan *trawl*, juga menjadi momentum penting bagi masyarakat dalam membangun strategi adaptasi baru, dengan pengalihan mata pencarian sebagai penambak, membuka hutan mangrove menjadi area pertambakan dengan dana kredit pengalihan kegiatan ekonomi non *trawl*.

Ironisnya, pasca pelarangan *trawl* secara total di awal 1983, terjadi “kontradiksi kebijakan”, ketika Mentan mengeluarkan SK No. 24/ Kpts /Um /1983 yang membagi Kaltim berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan, dimana Delta Mahakam hampir seluruhnya ditetapkan sebagai hutan produksi. Status ini dipertahankan sampai 1992, bahkan berdasarkan SK Menhut No. 79/ Kpts-II/ 2001, pemerintah kembali menetapkan kawasan ini sebagai hutan produksi. Sekalipun secara faktual 85.000 Ha dari 150.000 Ha luasan hutan Delta Mahakam telah beralih fungsi. Dalam kebijakan tersebut nampak sekali peran pemerintah yang dominan dalam mendefinisikan suatu kawasan hutan. Tarikan garis di atas kertas peta, secara mutlak telah menghilangkan akses masyarakat atas sumber daya yang secara tradisi sudah mereka lakukan jauh sebelum negara ini ada.

Meskipun sejak 1983 pemanfaatan hutan mangrove harus melalui hak pengusahaan atau pemungutan hasil hutan, yang dimohonkan kepada Mentan. Bahkan, SK Bersama Mentan dan Menhut No. KB. 550 /246 /Kpts /4/1984 telah melarang kegiatan budi daya perikanan di kawasan hutan pantai/ pulau yang luasnya kurang dari 10 Km². Kenyataannya, pembabatan hutan untuk pertambakan tetap berlangsung tanpa penertiban. Meskipun telah menetapkan Delta Mahakam sebagai KBK yang terlarang bagi kegiatan diluar sektor kehutanan, pemerintah tampaknya tidak pernah berniat menertibkan kegiatan yang dikategorikan “ilegal” ini.

Pembangunan tambak-tambak baru yang terus berlangsung dan ketidakpedulian masyarakat atas hukum formal, semakin menguatkan indikasi negara sebagai pemilik otoritas tertinggi atas tanah negara, telah melakukan “pembiaran” terjadinya praktik penguasaan sumber daya agraria secara ilegal. Sekedar mengantisipasi munculnya gejolak masyarakat dalam “mengelola hutan”. Kondisi ini mengingatkan keprihatinan Burger ketika melihat hutan di Jawa yang memberikan “bagian sangat kecil dari pendapatan nasional”, karenanya tujuan utama dalam mengelola hutan adalah mengontrol penduduk yang tinggal di pedalaman/ sekitar hutan, bukan untuk mencari keuntungan (Li, 2002). Alasan ini relevan untuk menjelaskan keberadaan mega proyek industri migas

yang perlu mendapatkan proteksi dan pengamanan optimal dari berbagai kepentingan, dengan mempertahankan status Delta Mahakam yang telah *collapse* sebagai hutan produksi.

Proses Pembentukan Pengusaha Perikanan Lokal

Fase Perikanan Tangkap. Ekspansi industri perikanan Jepang di Indonesia merupakan momentum penting dalam perbaikan hubungan pasca penjajahan, sebagai komitmen “Perjanjian Damai dan Ekspansi Industri Perikanan” pada 20 Januari 1958. Hingga Oktober 1968, total investasi perikanan asing mencapai US\$ 11,5 juta dari total komitmen investasi US\$ 324 (Suadi, 2008). Dimana perusahaan perikanan Jepang, memainkan peran penting dalam modernisasi perikanan *trawl*. Hasilnya, ekspor perikanan meningkat fantastis, dari US\$ 229 ribu pada 1962, menjadi US\$ 17,5 juta pada 1971 dan US\$ 211,1 juta tahun 1980, dimana 77,6 persen dari nilai total diekspor ke Jepang. Sampai 1995, tercatat keberadaan 289 perusahaan perikanan, dengan rincian 28 PMA, 121 PMDN, 134 swasta nasional dan 6 BUMN perikanan. Dengan investasi PMA mencapai US \$ 93,5 Juta, PMDN

328.603,2 juta rupiah dan Swasta Nasional 865.240,0 juta rupiah, serta BUMN perikanan 19.650,0 juta rupiah (Soewito, dkk., 2011).

Produksi udang nasional, mencapai puncaknya pada 1979, satu tahun sebelum pelarangan *trawl*. Setelah 1979 produksi udang nasional berfluktuasi, dimana 1980 turun 10,27 persen menjadi 148.109 MT, lalu meningkat 151.609 MT pada 1981 dan menurun 6,07 persen, kemudian meningkat lagi 5,21 persen pada 1983. Selanjutnya menurun 3,26 persen di tahun 1984, meningkat pada 1985 sebesar 8,51 persen, dan cenderung meningkat sejak 1986. Kondisi ini merangsang *cold storage*, di pantai timur mensponsori dilakukannya modernisasi armada tangkap nelayan lokal, selain mengoperasikan armada *trawl* bertonase besar milik sendiri, hingga mencapai 9.609 unit armada perikanan laut pada 1990 (Dinas Perikanan Kaltim, 1991). Periode ini ditandai lahirnya *pongawa* pengikut, sebagai konsekuensi peningkatan produksi, sehingga membuka peluang kehadiran pedagang perantara pada area-area yang tidak mampu ditangani perusahaan eksportir, maupun *pongawa* perintis.

Tabel 1. Pelapisan Sosial dan Asal-Usul Keberadaan Pengusaha Perikanan Lokal

Jenis Ponggawa	Asal-Usul	Keterangan
Lapisan Sosial Ponggawa Perintis	Menjadi <i>pongawa</i> sebelum adanya kegiatan industri perikanan	Banyak diantara mereka adalah migran yang datang pada periode 1950 – 1965. Mereka adalah nelayan yang merangkap menjadi pedagang perantara, meskipun ada diantara mereka yang berasal dari golongan bangsawan Bugis. Hasil produksi yang berhasil dikumpulkan dari kegiatan perikanan tangkap tersebut selanjutnya dijual pada para pedagang besar di kota Samarinda/ Balikpapan/ Tarakan. Namun banyak diantara mereka yang tidak mampu <i>survive</i> karena kurang adaptif dan visioner dalam melihat perubahan disekitar mereka. Meskipun mampu melakukan mobilitas vertikal, namun para <i>pongawa</i> perintis ini tidak mampu mengembangkan diri menjadi <i>entrepreneur</i> lokal yang sanggup membangun industri perikanan yang kokoh.
Lapisan Sosial Ponggawa Pengikut	Menjadi <i>pongawa</i> setelah adanya kegiatan industri perikanan	Dari golongan <i>pongawa</i> inilah banyak di jumpai adanya bibit-bibit <i>entrepreneur</i> lokal yang diharapkan mampu bersaing dalam bisnisme perikanan. Kemunculan mereka tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan industri perikanan ekspor yang telah ada sejak awal 1974-an, karena perusahaan-perusahaan eksportir inilah yang telah mendorong kemunculan mereka. Keberadaan <i>pongawa-pongawa</i> lokal tersebut, sepertinya tidak disadari oleh perusahaan-perusahaan eksportir yang telah eksis sebelumnya, bakal mampu menjadi pesaing yang handal bagi usaha bisnis mereka. Dengan menggunakan keunggulannya dalam melakukan hegemoni secara ekonomi dan sosio-kultural <i>entrepreneur</i> lokal ini, bahkan mampu membangun usaha industri perikanan yang kokoh.
Lapisan Sosial Ponggawa Penerus	Menjadi <i>pongawa</i> karena faktor keturunan/ pewarisan usaha	Golongan <i>pongawa</i> penerus ini cenderung konsumtif dan pragmatis dalam mengelola bisnis yang diwariskan oleh orang tua mereka. Banyak diantara mereka yang tidak hanya menekuni usaha disektor perikanan, namun juga tertarik untuk menggeluti bisnis lain, seperti sebagai kontraktor, usaha pertambangan, perkebunan kelapa sawit serta perdagangan kebutuhan pokok. Meskipun demikian, tidak sedikit diantara mereka yang mengalami kebangkrutan dan beralih profesi di tempat lain, akibat kesalahan dalam mengelola keuangannya.

Sumber: Diolah dari Data Empiris, 2011

Fase Perikanan Budi Daya. Selain menyebabkan produksi udang hasil tangkapan nelayan tradisional menurun, pelarangan *trawl* juga menyebabkan pengalihan kegiatan ekonomi nelayan lokal secara sepihak. Padahal pertimbangan penghapusan *trawl* menurut Keppres No. 39/1980 adalah mendorong peningkatan produksi nelayan tradisional. Kebijakan kontraproduktif tersebut, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penertiban secara keras, bahkan diikuti penangkapan nelayan *trawl* oleh aparat keamanan. Menariknya, penghapusan *trawl* yang sudah diperkirakan berakibat pada penurunan produksi udang nasional tersebut, “disisipi harapan” untuk mengamankan “Program Udang Nasional”, seperti tertuang dalam Pasal 7 Keppres No. 39/1980.

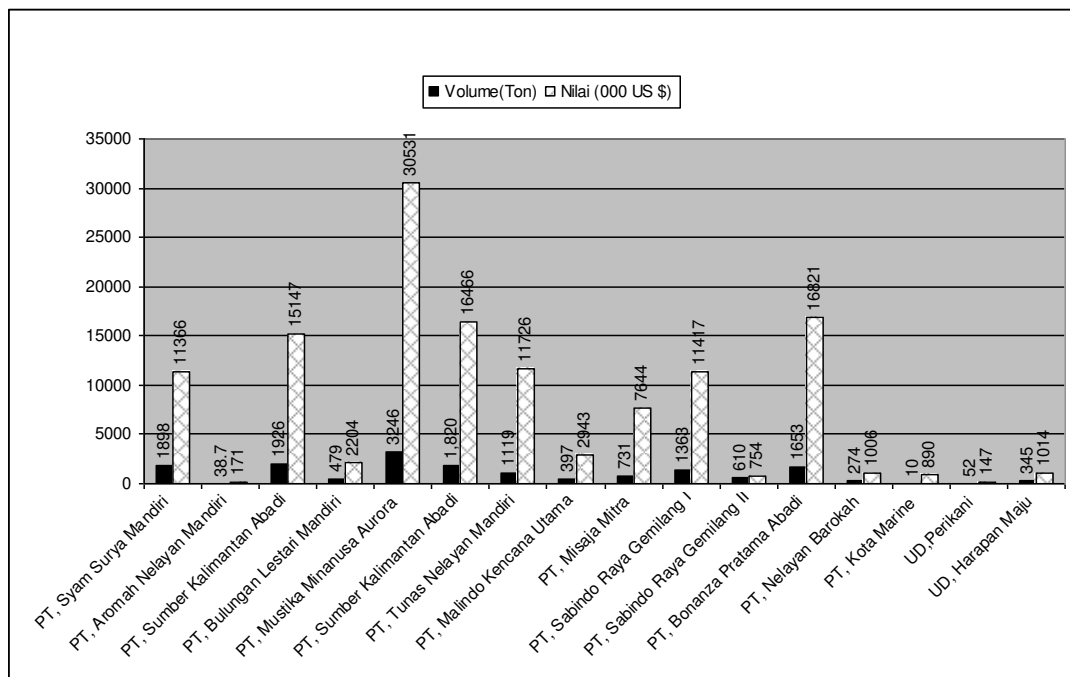
Kebijakan “turunan” inilah, yang secara tidak langsung menggiring nelayan tangkap beralih profesi sebagai pembudi daya. Sebagai upaya meningkatkan ekspor non-minyak, melalui kegiatan ekstraksi sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Rintisan awalnya dimulai pada 1971 melalui proyek pembangunan perikanan yang didukung bantuan FAO. Disusul dengan proyek *Brackishwater Shrimp and Milkfish Culture Research and Training* di Jepara pada 1972-1981. Selain penerapan teknologi polikultur dalam budi daya udang di Jatim, yang mendapatkan dukungan kredit Bank Dunia dan IBRD sejak 1975, dilanjutkan 1979 dengan proyek pedesaan Bank Dunia.

Guna mendukung pengembangan tambak udang pemerintah pun membangun infrastruktur yang diperlukan, melalui anggaran nasional maupun asing. Diantaranya berasal dari ADB melalui *Brackishwater Aquaculture Development Project* dan Bank Dunia melalui *Fisheries Support Services Project*. Tahap I dari BADP dimulai 1983/1984 dan berakhir 1989/1990. Bank

Dunia melalui FSSP mulai bekerja 1987/1988 dan berakhir 1994/1995. Proyek ini mencakup intensifikasi tambak udang seluas 18.000 Ha (Aceh 5.000 Ha; Sulsel 11.000 Ha; Sultra 2.000 Ha). Sementara tahap II bantuan ADB melalui BADP terkait ekstensifikasi *tambak* di Aceh, Sumut, Riau, Kalsel, Kaltim dan NTB. Kegiatan ini melibatkan sektor swasta sebagai inti dan petani *tambak* sebagai plasma dengan konsep TIR (*Shrimp Culture Development Project* UNDP-FAO, 1990).

Di aras lokal pun Pemerintah Daerah menyambut dengan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk “mengamankan Program Udang Nasional”. Diawali penerbitan SK Gubernur No. 66/1987, tentang Rencana dan Ketentuan Pokok Usaha Intensifikasi Tambak; SK Gubernur No. 83/590-IX/Um-38/1987, tentang; Pencadangan Areal Tanah Seluas ± 600 Ha di Pulau Letung-Muara Badak, Kabupaten Kutai untuk Pengembangan Budi daya Udang Pola TIR; SK Walikota No. 84/1987, tentang Intensifikasi Tambak dalam Kodya Samarinda; dst. Secara keseluruhan kebijakan yang ditempuh mendorong terjadinya konversi hutan mangrove untuk pertambakan.

Jika mencermati latar belakang penerbitan Keppres No. 39/1980 hingga proses pelaksanaannya, sulit untuk tidak mengatakan “penerbitan Keppres No. 39/1980 sarat dengan berbagai kepentingan”. Tentunya kolaborasi kepentingan penguasa, pemodal nasional dan asing disektor perikanan, melalui penetrasi kapital lembaga keuangan internasional. Meskipun kebijakan tersebut berdampak pada konversi hutan negara secara *massive*, namun dilain sisi juga mendorong kemunculan *entrepreneur* lokal yang berhasil memanfaatkan momentum tersebut, sehingga mampu mengembangkan pertumbuhan kapitalisme lokal berbasis perikanan budi daya.



Gambar 2. Volume dan Nilai Produksi Perusahaan Eksportir Kalimantan Timur 2009

Sumber: Diolah dari Data Empiris, 2011

Fase Konsolidasi. Ditandai terakumulasinya alat produksi hingga terkonsentrasinya *raw material* pada kelompok-kelompok *pongawa*. Ketidakterediaan *raw material* inilah yang kemudian menyebabkan *collapse*-nya industri perikanan ekspor, tidak terkecuali PMA Jepang, yang kemudian di-*take over* oleh salah seorang *pongawa* besar di Delta Mahakam. Tahun 2007 merupakan masa-masa kebangkrutan perusahaan eksportir perikanan pioner di kawasan Delta Mahakam, Misaya Mitra (PMA) dan Cendana Cold Storage (PMDN), yang secara pasti tereliminasi oleh kehadiran perusahaan eksportir lokal (Syam Surya Mandiri). Setidaknya hingga akhir tahun 2009, Tujuh (44%) dari enam belas perusahaan industri pengolahan udang ekspor yang masih aktif beroperasi di Kalimantan Timur dimiliki orang Bugis, yang tidak hanya mampu bersaing dengan pengusaha keturunan Cina (mencapai 31%) dan “pemain” asing lainnya (mencapai 25%), namun juga memiliki keunggulan komparatif, karena didukung jaringan patronase pertambangan yang kokoh dan penguasaan sumber daya yang memberikan jaminan pasokan *material raw* secara berkelanjutan.

Pergeseran Rasionalitas Pengusaha Bugis Migran

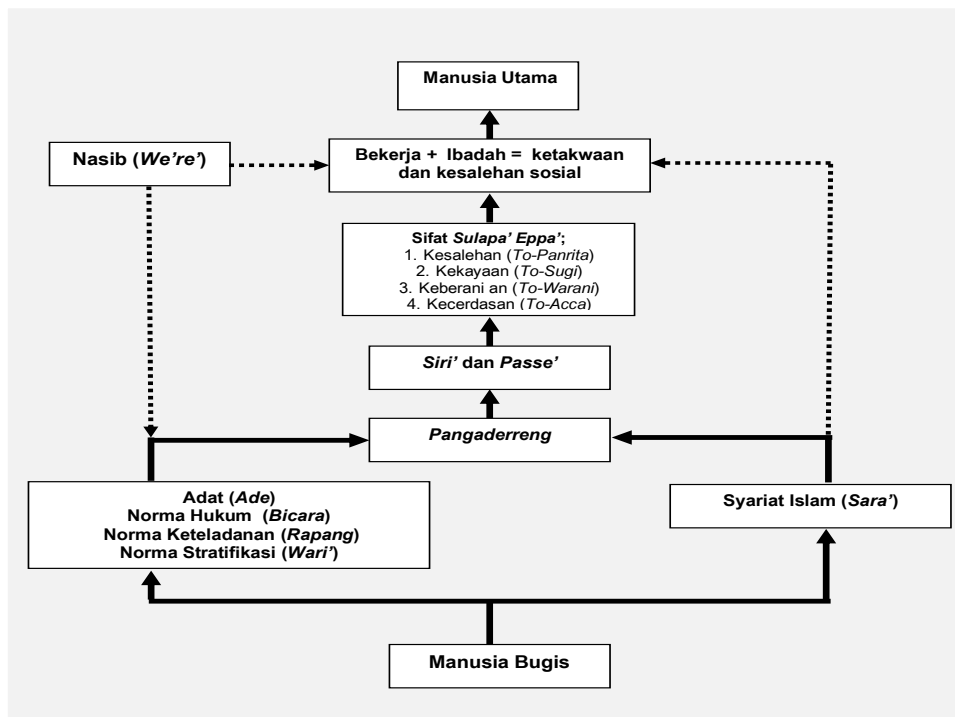
Basis Nilai Moralitas

Wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat, serta tata-tertib, namun juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia dalam bertingkah-laku dan mengatur prasarana kehidupan manusia Bugis disebut *panngaderreng* (Mattulada, 1985). Konsep *panngaderreng* (falsafah hidup) tersebut merupakan serangkaian norma yang berkaitan satu sama lainnya, yang terdiri dari: (1) *ade'* (adat yang mengatur hal ihwal

perkawinan serta hubungan kekerabatan dan norma bernegara dan memerintah); (2) *bicara* (norma hukum yang bersangkutan paut dengan peradilan); (3) *rapang* (pandangan hidup ideal yang dapat memberikan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat); (4) *wari'* (norma yang mengatur stratifikasi dalam masyarakat); dan (5) *sara'* (syariat yang mengandung pranata-pranata dan hukum Islam). Unsur-unsur tersebut terjalin sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran orang Bugis yang mendasari sentimen kewargaan masyarakat dan identitas sosial, serta martabat dan harga diri yang kesemuanya terkandung dalam konsepsi *siri'*.

Kecendrungan yang luar biasa untuk selalu mencari peluang ekonomi yang lebih baik dimanapun dan kapanpun tampaknya menjadi ciri khas yang tetap melekat dalam diri orang Bugis dimanapun. Begitu kuatnya motif ekonomi dalam setiap mobilitas yang dilakukan orang Bugis, memberikan kesan bahwa peranan uang atau hartalah yang banyak menentukan nasib dan status seseorang. Sangat banyak ulama yang menganggap usaha memperkaya diri sebagai suatu kewajiban, sepanjang dilakukan secara jujur dan halal (*sappa' dalle' hallala'*), karena memungkinkan seseorang mampu membantu sesama yang kurang beruntung (Pelras, 2006). Orang Bugis, bahkan mempertaruhkan *siri'*-nya ketika merantau, mereka “merasa malu bila tidak bisa pulang untuk memperlihatkan bukti keberhasilannya di rantau”.

Siri' bukanlah semata-mata persoalan pribadi yang muncul secara spontan, *siri'* lebih sebagai sesuatu yang dirasakan bersama dan merupakan bentuk solidaritas sosial. Hal ini dapat menjadi motif penggerak penting kehidupan sosial dan pendorong tercapainya suatu



Gambar 3. Etika Moral Pongawa Bugis

Sumber: Diolah dari Data Empiris, 2011

prestasi sosial masyarakat Bugis, meskipun tidak sedikit terjadi penerapan *siri'* yang salah sasaran, seperti pada banyak kasus balas dendam. Secara gamblang Hamid Abdullah (1985), menyatakan bahwa “tidak ada satu nilai pun yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi selain dari pada *siri'*”.

Bagi manusia Bugis (Makassar), *siri'* adalah jiwa mereka, harga diri mereka dan martabat mereka. Sebab itu untuk menegakkan dan membela *siri'* yang dianggap tercemar oleh orang lain, maka manusia Bugis (Makassar) akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang berharga demi tegaknya *siri'* dalam kehidupan mereka. Biasanya *siri'* seiring sejalan dengan *passe'* yang berarti “ikut merasakan penderitaan orang lain dalam perut sendiri”, mengindikasikan perasaan empati yang mendalam terhadap tetangga, kerabat atau sesama anggota kelompok sosial. *Passe'* berhubungan erat dengan identitas, merupakan pengikat para anggota kelompok sosial, seperti pada sesama perantau yang berada di negeri orang/ di suatu tempat di luar daerah Sulawesi Selatan, yang kerap mendasari rasa memiliki identitas “ke-Bugis-an” mereka. Karenanya konsep *siri'* dan *passe'*, dapat digunakan sebagai kunci utama untuk memahami berbagai aspek perilaku sosial orang Bugis, khususnya dua perilaku mereka yang tampak saling berlawanan (ambigu), yaitu: (1) persaingan yang dapat dipahami melalui konsep *siri'* dan (2) kesetiakawanan yang dapat dipahami melalui konsep *passe'* (Pelras, 2006).

Persaingan seperti inilah yang menurut Hamid Abdullah (1985), memiliki arti penting sebagai pendorong dilakukannya suatu usaha atau pergi merantau dalam rangka mencapai keberhasilan dibidang ekonomi. Sementara, kecendrungan mereka yang tampaknya saling berlawanan (berpandangan hierarkis sekaligus egalitarian, dorongan untuk berkompetisi sekaligus berkompromi, menjunjung tinggi kehormatan diri tetapi juga solider terhadap sesama orang Bugis) dipadukan dengan nilai-nilai keutamaan, seperti keberanian, ketaatan terhadap ajaran agama dan kelihaihan berbisnis merupakan unsur-unsur penggerak utama dalam perkembangan kehidupan sosio-ekonomi dan politik mereka selama ini.

Budaya Bisnis Bugis

Dalam tiga-empat dasawarsa terakhir, terjadi perubahan orientasi migran Bugis dalam mengembangkan usahanya. Hal ini terlihat dari peran orang Bugis dalam *boom* coklat di Indonesia yang memanfaatkan jaringan informasi penanaman dan perdagangan coklat, sehingga mampu menangani sendiri seluruh tahapan pemasaran produk mereka (Ruf, 1991). Fenomena tersebut, tampaknya juga diperankan migran Bugis dalam kegiatan pertambakan udang di Delta Mahakam, hingga terjadinya *boom* udang pada 1998/ 1999. Mereka mampu memanfaatkan jaringan informal produksi pertambakan udang lokal dan perdagangan udang di tingkat regional maupun internasional, sehingga kegiatan usahanya dapat berkembang dengan pesat, bahkan mampu bersaing dengan “pemain luar”. Hingga akhirnya, mereka mampu “menaklukkan” sektor industri hilir (*handling and processing*) sampai dengan distribusi pemasarannya. Itu

berarti, keberhasilan *Ponggawa* Bugis dalam kegiatan usaha pertambakan, tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola komoditas yang diperdagangkan secara berkelanjutan, sekaligus kelihaihan mereka di dalam memproduksi sendiri dan memperdagangkan komoditas yang berorientasi pada dinamika pasar dan menguntungkan.

Sebuah alasan penting bagi bertahannya keberhasilan industri pengolahan udang yang dibangun migran Bugis tampaknya berkaitan dengan pemanfaatan waktu. Sejumlah migran Bugis berhasil memanfaatkan momentum “keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai”. (1) Yang pertama menguasai “tanah negara”, yang menjadi kunci operasi usaha pertambakan. (2) Yang pertama mendapat bantuan eksportir dan berkoalisi dengan otoritas lokal sehingga berhasil mengakumulasi modal untuk menguasai alat produksi, sekaligus membangun industri dalam kesempatan pertama. (3) Yang pertama memanfaatkan komponen budaya *patronase* untuk monopoli *raw material*. (4) Yang pertama mengembangkan jaringan informasi perdagangan dan terkoneksi dengan pasar.

Seperti orang Cina yang digambarkan Barton, pendekatan orang Bugis ke dalam bisnis tampaknya juga didasarkan pada hubungan pribadi dan kesepakatan lisan yang didukung oleh sanksi-sanksi kelompok informal yang dikaitkan dengan reputasi seseorang dalam jaringan tempatnya bergabung (Mackie, 1999). Meskipun demikian, dalam tradisi Bugis praktik tersebut didorong oleh ikatan ke-Bugis-an *passe'*, yang terlekat dalam hubungan *patronase*, sedangkan dalam tradisi Cina di dorong oleh semangat *guanxi* setara dengan *passe'* yang berarti solidaritas kelompok. Berbeda dengan *passe'* yang selalu berpasangan dengan *siri'* yang berarti harga diri, *guanxi* selalu berpasangan dengan *xinyong* yang berarti kepercayaan. Konsekuensi penting dari ketergantungan pada *guanxi* dan *xinyong* dimana kepercayaan, solidaritas sosial dan sebuah masyarakat yang relatif tanpa kelas dan bebas telah bergabung di kalangan orang Cina, adalah terbangunnya nilai-nilai kebaikan sipil yang kondusif bagi penanganan bisnis yang berhasil dikalangan mereka sendiri (Mackie, 1999). Sementara konsekuensi ketergantungan orang Bugis pada *siri'* dan *passe'* adalah berbagai aspek perilaku sosial yang tampaknya saling berlawanan, yaitu persaingan dan kesetiakawanan (Pelras, 2006). Selanjutnya *siri'* dan *passe'* akan beroperasi dalam sistem hirarki (*wari'*) dalam masyarakat Bugis yang membedakan orang berdasarkan keturunannya, namun pada saat yang sama memberi peluang yang sama kepada orang-orang dari status sederajat, sehingga sangat kontradiktif. Akibatnya pola transaksi bisnis yang dibangun orang Bugis akan menunjukkan ciri-ciri spekulatif.

Kegiatan pertambakan di kawasan Delta Mahakam yang penuh dengan resiko, tampaknya sangat sesuai dengan watak migran Bugis yang selalu berani menanggung resiko, selama resiko yang akan ditanggungnya sebanding dengan hasil yang diperolehnya. Pelras (2006), mencatat bahwa keinginan untuk memperkaya diri tampaknya merupakan motivasi paling kuat untuk

dan menjadi pendorong utama usaha perdagangan sebagian besar dari mereka. Lebih lanjut menurut Pelras, gambaran dalam banyak cerita Bugis setidaknya membenarkan tujuan seseorang yang ingin menghalalkan segala cara. Karena bagi orang Bugis transaksi bisnis yang dipraktikkan dapat diwujudkan dengan mengikuti aturan main yang membuka peluang terjadinya persaingan yang ketat, tanpa harus tergelincir ke dalam anarki yang dapat membahayakan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Dengan kerangka seperti itu, sifat baik seseorang bukan hal yang mutlak ada, akan tetapi sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Tidak heran jika mereka tidak akan merasa gentar dengan kegiatan usaha yang “menyerempet” bahaya. Termasuk dalam mengembangkan kegiatan usaha pertambakan yang dikategorikan ilegal oleh otoritas berwenang, karena menguasai dan memanfaatkan tanah-tanah negara tanpa izin. Selain itu, juga muncul kecenderungan lain dalam pembangunan tambak-tambak baru, yaitu harapan mendapatkan ganti rugi dari operasi migas di sekitar tambak yang mereka kuasai. Besarnya biaya ganti rugi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan migas atas dampak operasi yang mereka lakukan, setidaknya telah mendorong munculnya “spekulan-spekulan” yang berusaha memburu informasi keberadaan lokasi-lokasi eksplorasi dan pengembangan jaringan (pipa) distribus migas di sekitar kawasan tambak. Tidak sedikit diantara para spekulan tersebut, adalah mereka yang tergabung di dalam sebuah jaringan klik *pongawa* tertentu. Bahkan, tidak sedikit diantara mereka yang terlibat di dalam kegiatan kejahatan dan kriminal, akibat ketiadaan peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada bidang pekerjaan yang legal. Dengan berprofesi sebagai penyelundup dikawasan perbatasan, pencurian hasil tambak ataupun aktivitas perdagangan ilegal lainnya.

Habitualisasi: Tambak Yang Mendisiplinkan

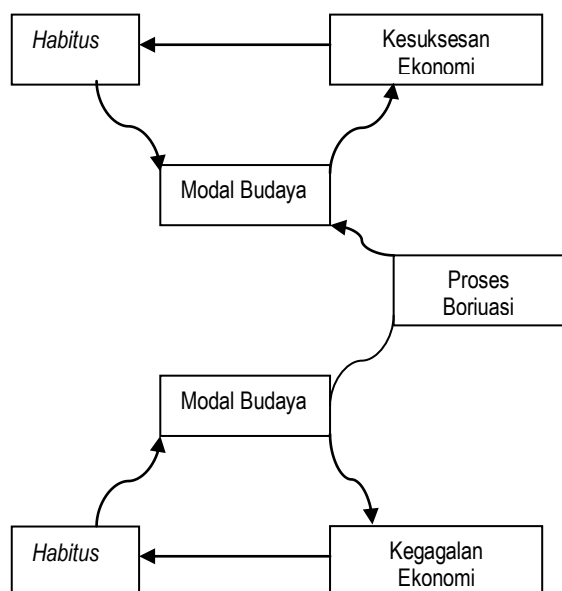
Hampir semua *pongawa* yang tetap eksis di kawasan Delta Mahakam memulai merintis usahanya sebagai seorang penambak dan ketika menjadi penambak inilah para *pongawa* mendapatkan proses pembelajaran dan pengemblengan untuk mendisiplinkan diri. Mengapa hal ini perlu diungkap? Karena menurut hemat peneliti, pada masa inilah mereka melalui sebuah tahapan alamiah yang akan menentukan wujud karakter usaha pertambakan yang akan mereka kembangkan ke depan. Meskipun tidak menunjukkan keseragaman, peneliti melihat tahapan pengelolaan tambak yang akan dilalui oleh penambak hingga masa panen memiliki kesamaan, meskipun diantara mereka memberikan perlakuan yang berbeda terhadap tambaknya. Ciri khas dari pengelolaan tambak-tambak tradisional di kawasan Delta Mahakam, adalah tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alam. Karenanya setiap penambak harus patuh pada ketantuan alam, jika ingin mendapatkan hasil

produksi yang maksimal atau setidaknya jika ingin bisa tetap *survive*. Secara alamiah, para penambak akan terdidik untuk mengikuti ketentuan alam, proses pembelajaran dan pengemblengan terus-menerus inilah yang pada akhirnya menuntun naluri mereka untuk bisa mendisiplinkan diri.

Kelak kebiasaan untuk selalu mendisiplinkan diri dalam kegiatan pertambakan ini akan terbawa dalam kehidupan sosial, sehingga tanpa disadari menjadi “*habitus*” yang kokoh bagi keberlangsungan kegiatan usaha dibidang lainnya. Banyak dari para *pongawa* sukses yang pada awalnya berprofesi sebagai penambak, ternyata tetap membawa dan terpengaruh secara nyata oleh “*habitusnya*”, sehingga dengan mudah mampu mendisiplinkan dirinya untuk berprestasi secara ekonomi. Aktivitas pertambakan, telah melakukan pengaturan secara total, menempatkan para penambak dalam posisi siap siaga melakukan “penjagaan” secara disiplin, sehingga tanpa disadari telah mendidik dan mengubah mereka menjadi seperti apa yang dituntut oleh alam, yaitu menjadi patuh, jinak, produktif, mampu bekerja keras dan dapat mengatur diri sendiri, hingga mampu mengendalikan diri.

Menurut Pierre Bourdieu, *habitus* merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. *Habitus* adalah produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan ketika berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam perjalanan hidupnya manusia memiliki sekumpulan skema yang terinternalisasi dan melalui skema-skema itu, mereka mempersepsi, memahami, menghargai dan mengevaluasi relitas sosial. Jelasnya *habitus* merupakan hasil pembelajaran lewat pengalaman, aktivitas bermain dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas. Pembelajaran itu terjadi secara halus, tak disadari dan tampil sebagai hal wajar, sehingga seolah-olah sebagai sesuatu yang alamiah, seakan-akan terberi oleh alam atau “sudah dari sananya” (Takwin, 2006).

Habitus mendasari ranah yang hadir terpisah dari kesadaran individual, ranah merupakan metafora yang digunakan Bourdieu, menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur dan dinamis dengan daya-daya yang dikandungnya (Harker Dkk, 2006). Dalam konteks penelitian ini, ranah merupakan jaringan relasi antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial pertambakan, yang terdiri dari beragam tatanan sosial pertambakan dan memiliki sejumlah hubungan terhadap satu sama lainnya, serta sejumlah titik kontak. Ranah mengisi ruang sosial yang analog dengan realitas sosial. Ruang sosial individu dikaitkan melalui waktu dengan serangkaian ranah tempat orang-orang berebut berbagai bentuk modal, khususnya akses atas sumber daya agraria/ hutan mangrove yang dapat dikonversi menjadi area pertambakan.



Gambar 4. Siklus Reproduksi *Habitus*

Sumber: Harker dkk, 2008

Di dalam suatu ranah ada pertarungan, kekuatan-kekuatan serta orang yang memiliki banyak modal dan orang yang tidak memiliki modal. Setiap ranah menuntut individu untuk memiliki modal-modal khusus agar dapat hidup secara baik dan bertahan di dalamnya. Dalam ruang sosial inilah, individu dengan *habitus*-nya berhubungan dengan individu lain dan berbagai realitas sosial yang menghasilkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ranah dan modal yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan praktik yang diharapkan. Praktik merupakan suatu produk dari relasi antara *habitus* dan ranah sebagai produk sejarah, yang juga merupakan produk dari medan daya-daya yang ada dalam masyarakat. Karenanya dengan *habitus*, pemahaman terhadap ranah dan penguasaan modal, individu dapat mempertanyakan struktur, bahkan mengubahnya sesuai dengan keinginan.

Seperti diketahui, kehidupan menjadi penambak bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, kegiatan tersebut merupakan sebuah “ritual” yang menuntut totalitas diri penambak (tidak hanya secara fisik namun juga bathin) untuk bisa menyatu dengan “roh semesta” (tambak-tambak) yang akan dikelolanya. Ada dimensi spiritual yang ikut menggerakkan kegiatan usaha pertambakan udang. Menurut Haji Rustam yang juga Direktur Syam Surya Mandiri, “kegiatan usaha pertambakan udang berbeda dengan kegiatan usaha lain seperti perkebunan kelapa sawit, dimana seorang pengusaha bermodal besar dari luar daerah/ asing, dapat dengan mudah berhasil mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawitnya tanpa keterlibatan langsung dari sang pemodal. Di dalam kegiatan budi daya tambak di kawasan Delta Mahakam, hampir semua penambak yang kedudukannya berkembang menjadi *pongawa* hingga eksportir yang berhasil, adalah mereka yang membangun tambak-tambaknya dari nol”. Tidak ada satupun dari mereka berangkat dari latar belakang pengusaha sukses yang memiliki modal besar. Mereka

semua “merangkak” dari bawah, hanya mereka yang sabar, tekun dan mampu mendisiplinkan diri untuk secara total bekerja dan mendedikasikan dirinya dalam mengelola budi daya tambak udang miliknya yang akan berhasil menjadi “pemenang” dalam persaingan dan ketidakpastian produksi.

Proses pendisiplinan diri inilah yang kemudian menyeret mereka yang telah “terformat”, untuk melakukan pendisiplinan diri dalam banyak hal diluar kegiatan pertambakan. Banyak diantara penambak yang kini telah berhasil menjadi *pongawa*, bahkan eksportir yang berhasil, tampaknya telah dibentuk oleh keadaan tersebut, oleh ritual pertambakan yang menuntut pendisiplinan diri, disiplin pada waktu dan sigap terhadap perubahan. Hal ini tentu saja akan menjadi modal penting, dalam menjalankan kegiatan bisnis perikanan (udang) yang sangat kompetitif dan penuh ketidakpastian.

Teoritisasi Pembentukan Ekonomi Lokal

Seperti ditunjukkan Gambar 5, pembentukan ekonomi lokal-pertambakan terjadi akibat terkonsentrasinya alat produksi pada sejumlah pihak yang berhasil memanfaatkan “keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai” pasca pelarangan *trawl* pada 1983. Sekaligus berhasil dalam “menaklukkan ruang” sosio-kultural melalui hegemoni kultural – monopoli, sebagai strategi adaptasi yang mendorong “akresi kapital”. Sebuah proses pengendapan kapital pada sejumlah *pongawa*, seiring terjadinya abrasi; pada ruang ekologi; ruang ekonomi-politik; dan ruang sosio-kultural. Bentuk akumulasi alat produksi dan kapital inilah yang kemudian menggerakkan ekonomi lokal, hingga terjadi fenomena “penguasaan” sektor industri hilir (*handling and processing*) – pemasaran oleh *pongawa*. Artinya, keberhasilan pengusaha lokal, tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan mereka mengelola perdagangan komoditi secara berkelanjutan, sekaligus kelihaihan mereka dalam memproduksi dan memperdagangkan komoditas berorientasi pada dinamika pasar yang menguntungkan.

Penelitian ini mengungkapkan, meskipun hampir semua orang Bugis yang bermigrasi ke banyak daerah di nusantara, termasuk di Delta Mahakam adalah muslim fanatik, namun sebagian besar diantara mereka berasal dari kelas sosial yang tampaknya kurang tunduk (*exposure*) pada doktrin-tradisi “Islam Puritan”. Hal ini disebabkan ketergantungan sistematis kehidupan “duniawi” atas “agama” yang sakral, dimana yang “duniawi” tidak bernilai kecuali terhubung dengan “agama” (Mulkhan, 2000). Kunci sukses, meskipun dipercaya kehendak Tuhan, namun kehendak Tuhan dapat dicapai melalui upaya memperbaiki nasib tidak baik, dengan bekerja keras, sehingga dapat membangun simbol-simbol “peruntungan fitrah”. Misalnya, melalui pembangunan masjid yang dimengerti sebagai “rumah Allah”, menunaikan ibadah haji memenuhi panggilan Allah, serta berkorban dan menyantuni fakir-miskin yang dipahami sebagai media pembersihan diri. “Medan interaksi” yang terbangun kemudian menjadi wadah terjadinya transformasi, legitimasi dan habitualisasi yang menghasilkan wacana rasionalitas spiritual baru.

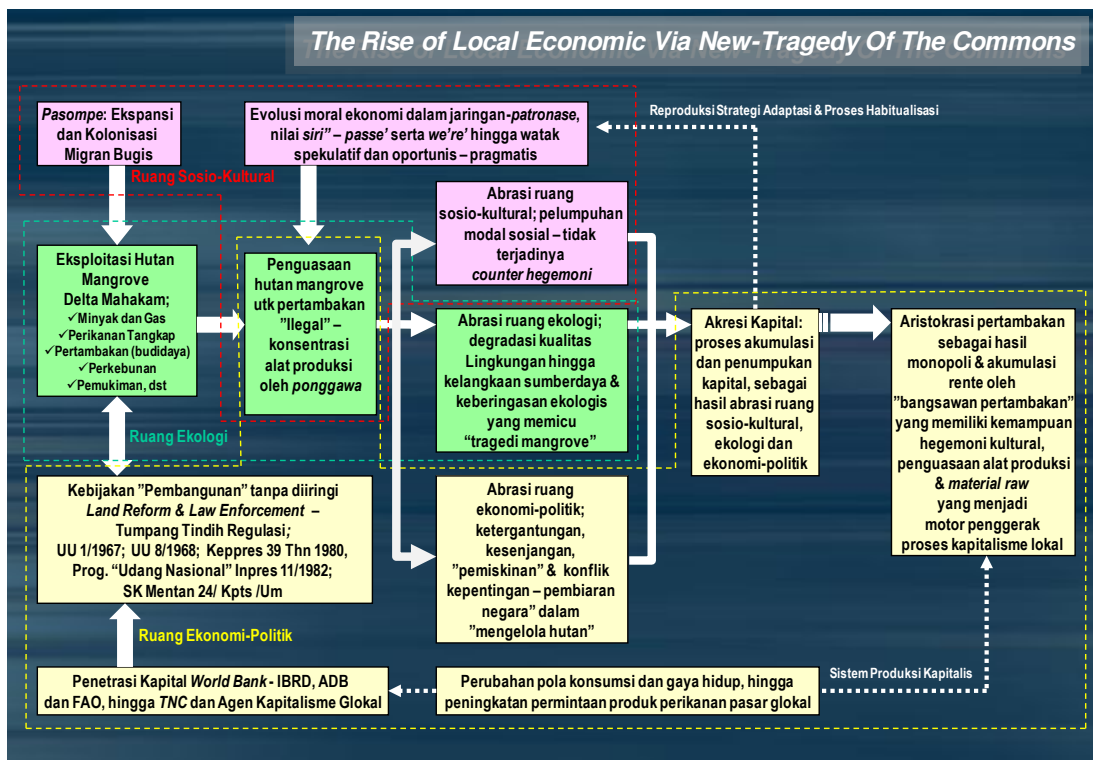
Kecendrungan demikian menjadi penanda menjadi kaya itu penting, sebagai ukuran kehormatan sosial yang dapat memenuhi kepuasan duniawi, bertingkah laku mengarah pada simbol-simbol agama secara sosial dianggap “taat beragama” yang dapat memenuhi kepuasan ukhrawi.

Pada gilirannya kegiatan ekonomi tertuju pada dua kepentingan sekaligus, yaitu pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrowi, yang bisa saling beriringan atau berlawanan. Membangun masjid, menunaikan ibadah haji, serta berkorban dan menyantuni fakir-miskin, berarti mendapatkan legitimasi sebagai “orang saleh”, yang secara sosio-religiositas layak dikategorikan sebagai pemimpin. Akibatnya, transformasi kehidupan keagamaan yang berporos pada agen menjadi penting dalam “medan interaksi” yang dikembangkan. Ketika tidak semua orang mengetahui syaria, peran “orang saleh” menjadi penting sebagai pembimbing dalam memperoleh “berkah” Tuhan. Dengan demikian, transformasi kehidupan keagamaan yang berporos pada agen, memperkuat pola hubungan vertikal dalam budaya *patronase* Bugis.

Meskipun hasil kajian ini tidak seperti temuan Geertz (1992) di Mojokoto, yang melihat hubungan antara asketisme dengan para pedagang Muslim yang mirip etika protestan. Namun, fenomena suka kerja keras, bukan untuk hasil duniawi tapi untuk pencapaian “ridho” Tuhan yang serba gaib, tampaknya serupa dengan temuan penelitian ini, yang mengungkap adanya penunaian kewajiban agama, meskipun digerakkan oleh motif-motif tertentu untuk memperoleh “ridho Tuhan” atas kewajiban yang telah ditunaikan. Disinilah terletak

persamaan mendasar antara etika *entrepreneur* Jawa dan Bugis yang cenderung melihat orientasi duniawi tidak terletak pada kerja rasional dan sistematis, tapi “ridho Tuhan” yang abstrak dan misterius. Sikap hemat dari hasil kerja keras, bukan untuk tujuan pemupukan kapital yang dapat membangun kekuatan materil, tetapi untuk tujuan spiritual (ibadah) itu sendiri. Meskipun sama dalam memandang kerja sebagai kewajiban, namun etika *entrepreneur* Jawa lebih fatalistik, karena gagal atau sukses dalam kehidupan duniawi dipercaya sebagai cara Tuhan membagi rezeki dan nasib sesuai kehendakNya (Mulchan, 2000). Sementara etika *entrepreneur* Bugis, cenderung tidak tunduk pada pertanda nasib tidak baik, dengan melakukan “manipulasi” dalam “medan interaksi”, sehingga dapat ditransformasi untuk memperbaiki *we're*.

Secara teoritik perkembangan pengusaha pertambakan yang menggerakkan ekonomi lokal di Delta Mahakam, gejalanya seperti disimpulkan Marx, bahwa kapitalis kecil (yang menjadi besar) sebagian berasal dari kalangan kelas bawah, bukan dari kelas elit-penguasa yang terikat tradisi dan konsisten dengan tesis Weber yang melihat mayoritas pengusaha mandiri berasal dari keluarga kelas pekerja atau lapis bawah, sehingga berbeda dengan temuan Wertheim (1999); van Neil (1984); Geertz (1992); Castles (1982), Sitorus (1999); dan Wasino (2008). Penelitian ini juga menolak konsepsi Kunio (1990) yang menyebut industrialisasi mandiri tidak mawujud di Asia Tenggara akibat kemunculan para pengusaha yang tidak didasarkan pada perkembangan teknologi memadai dan besarnya campur tangan



Gambar 5. Alur Pembentukan Ekonomi Lokal

Sumber: Diolah dari Data Empiris, 2011

pemerintah. Sekaligus mengkritik tesis Robinson (1986) dan Muhaimin (1990) yang hanya menandai pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan dominasi kapitalisme negara, kapitalisme borokrasi dan kapitalisme klien, yang sangat bergantung penguasa untuk dapat melakukan kegiatan bisnis atau peran ekonominya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa proses kebangkitan ekonomi lokal, terjadi akibat beroperasinya kegiatan industri perikanan ekspor yang membuka ruang bagi kehadiran pedagang perantara pada area-area yang tidak mampu ditangani perusahaan. Berdasarkan kemunculannya, para kapitalis lokal tersebut, dapat dikelompokkan sebagai; *pongawa* perintis; *pongawa* pengikut; dan *pongawa* penerus. Mereka yang mampu bertahan dan berhasil mengembangkan usaha adalah yang tidak hanya berhasil melakukan hegemoni secara ekonomi dan sosio-kultural, namun juga adaptif dan visioner melihat perubahan. Banyak di antaranya, *pongawa* pengikut, yang berhasil melakukan ekstensifikasi usaha, memanfaatkan momentum “keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai”, pasca pelarangan *trawl*. Mereka kemudian mampu memanfaatkan jaringan informal produksi pertambakan udang lokal dan perdagangan udang di tingkat regional maupun internasional, sehingga kegiatan usahanya dapat berkembang dengan pesat, bahkan mampu bersaing dengan “pemain luar”. Hingga akhirnya, mampu “menaklukkan” sektor industri hilir (*handling and processing*) sampai dengan distribusi pemasarannya.

Mekipun para pengusaha lokal, menciptakan ketergantungan secara ekonomi maupun sosio-kultural terhadap kelompok migan yang lebih lemah dengan membangun mekanisme hutang (lunak namun mengikat), serta mengembangkan jalur perdagangan berlapis, bahkan melakukan eksploitasi dengan penciptaan struktur pasar yang monopolistis dan monopsonistis, sehingga terjadi mekanisme penentuan harga dan penyediaan barang secara sepihak. Namun, pola hubungannya masih menyisakan ruang *resiprositas* yang melekat pada tradisi *passe*, sehingga mereduksi pola hubungan pertambakan yang cenderung eksploitatif. Pola hubungan patron-klien yang adaptif inilah yang mampu menopang keberlangsungan ekonomi lokal-pertambakan yang sarat persaingan dan ketidakpastian. Apakah kebangkitan ekonomi lokal akan benar-benar dapat diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi bangsa, inilah tugas besar yang harus dikawal oleh sistem kepemimpinan nasional yang tangguh dan berpihak pada keberdayaan ketahanan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Afri San, 2004. Dekonstruksi Sosial Forestri, Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Bapedda Kabupaten Kutai Kartanegara. 2007. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Delta Mahakam
- Castles, Lance. 1982. Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Chomitz, Kenneth M. 2007. Dalam Sengketa? Perluasan Pertanian, Pengentasan Kemiskinan dan Lingkungan Hidup di Hutan Tropis. Jakarta: Salemba Empat.
- Dinas Perikanan Kaltim. 1991. Laporan Tahunan 1990.
- Geertz, Clifford, 1992. Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Guba, Egon dan Yvonna Lincoln. 2000. *Competing Paradigms in Qualitative Research, in Denzin (Eds), “Handbook of Qualitative Research”, London: Sage Publication Thousand Oaks.*
- Hall, Derek, Hirsch Philip, dan Li Tania Murray. 2011. *Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia, Singapore: NUS Press.*
- Hamid, Abdullah. 1985. Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar. Jakarta: Inti Dayu.
- Hardiman, FB. 2003. Melampaui Positivisme dan Modernitas. Yogyakarta: Kanisius
- Harker, Richard, Cheelen Mahar dan Chris Wilkes, 2006. (HabituxModal) +Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ishak, Awang Farouq. 2003. Paradigma Hutan Lestari. Jakarta: Indomedia.
- Jimie, Mackie. 1999. Keberhasilan Bisnis di Kalangan Orang Cina Asia Tenggara dalam Hefner Robert, “Budaya Pasar”. Jakarta: LP3ES.
- Kunio. Yoshihara. 1990. Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
- Li, Murray Tania. 2002. Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta: Obor.
- Lombard, Dennys. 2005. Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid 1. Jakarta: Gramedia.
- MacKinnon, Kathy dkk. 2000. Ekologi Kalimantan. Jakarta: Prenhallindo.
- Mackie, Jimmie. 1999. Keberhasilan Bisnis di Kalangan Orang Cina Asia Tenggara, dalam Robert Hefner “Budaya Pasar: Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru, Jakarta: LP3ES.
- Matullada, 1985. Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Orang Bugis, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulkhan, Abdul Munir 2000. Islam Murni dalam Masyarakat Petani. Yogyakarta: Bentang.

- Muhaimin, Yahya. 1990. *Bisnis dan Politik*. Jakarta: LP3ES
- Peacock, James. 1978. *Purifying The Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesia Islam*. California: Cumming Publishing Company.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar
- Pelluso, Nancy Lee. 2006. *Hutan Kaya Rakyat Melarat*. Jakarta: Konphalindo.
- Purwanto, Semiarto, dkk, 2003. *Mencari Alternatif Ekonomi Lokal*. Depok: Lab Antropologi UI.
- Robinson, Richard. 1986. *Indonesia: The Rise Capital, North Sydney: Allen and Unwin*.
- Ruf Francois, 1991. *Cocoa Boom, "Smallholders Cocoa in Indonesia: Why a Cocoa Boom in Sulawesi?"*, *International Cocoa Conference*, Kuala Lumpur: 25-8 Sept 1991
- Sitorus, Felix Marlyn. 1999. *Pembentukan Golongan Pengusaha di Indonesia: Pengusaha Tenun dalam Masyarakat Batak Toba*. Disertasi Program Pascasarjana IPB.
- Soewito. 2011. *Perikanan Indonesia: Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta: Yasamina
- Suadi. 2008. *Refleksi 50 Tahun Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang dalam Sektor Perikanan*. Jakarta: Inovasi Vol. 11/ XX/ Juli 2008.
- Takwin, Bagus. 2006. *Proyek Intelektual Perre Bourdieu: Melacak Asal Usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial (Kata Pengantar) dalam Harker Richard, Cheelen Mahar dan Chris Wilkes. 1990. (Habitux Modal)+Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Turner, Bryan. 1984. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*. Jakarta: Rajawali.
- Shrimp Culture Development Project UNDP-FAO, 1990. Proceedings. Shrimp Culture Industry Workshop*. Jepara: 25-28 Sept 1990.
- Van-Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Wasino. 2008. *Kapitalisme Bumi Putra*. Yogyakarta: LkiS.
- Wertheim, WF. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yin, Robert K. 1996. *Studi Kasus: Desain dan Metoda*. Jakarta: Rajawali Pers.